

DAFTAR ISI

	hlm
Judul	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Prakata	v
Daftar Isi	viii
Intisari	xi
<i>Abstract</i>	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	19
3. Tujuan Penelitian	24
4. Keaslian Penelitian	25
5. Kegunaan Penelitian	40
6. Cara Penelitian	40
a. Bahan penelitian.	43
b. Alat pengumpulan data.	45
c. Cara pengumpulan data.	45
d. Analisis data.	46
e. Penarikan kesimpulan.	49
f. Kendala penelitian.	50
7. Sistematika Disertasi	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	54
1. Desain Konstitusional sebagai Penentu Sistem Pemerintahan	54
2. Karakteristik Sistem Pemerintahan Presidensial, Parlemonter, dan Hybrid	64
a. Sistem parlementer.	65

	b. Sistem presidensial.	77
	c. <i>Semi presidensial, president-parliamentary, dan premier-presidentialism.</i>	94
	3. Interpretasi Konstitusional <i>versus</i> Ekstra Konstitusional	108
	4. Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Jabatan Wakil Presiden	122
	5. Sistem Pemerintahan di Indonesia	164
	6. Konfigurasi Politik	182
BAB III	LANDASAN TEORI	186
	1. Interpretasi Konstitusional	188
	2. Desain Konstitusional	191
	3. Sistem Pemerintahan	192
	4. Kewenangan	194
	5. Kesatuan Kekuasaan Eksekutif (<i>Unitary Executive</i>)	195
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	204
	1. Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia	205
	a. Makna konstitusional pembantu presiden.	214
	b. Aspek kelembagaan dan regulasi jabatan wakil presiden.	232
	c. Praktek ketatanegaraan pemilihan jabatan wakil presiden.	266
	1) Fase awal berdirinya Republik Indonesia.	267
	2) Periode Republik Indonesia Serikat.	273
	3) Kembali ke negara kesatuan.	275
	4) Negara kesatuan berdasarkan UUD 1945.	283
	5) Negara kesatuan dengan sistem presidensial.	303
	2. Kedudukan dan Kewenangan Jabatan Wakil dari Waktu ke Waktu	312
	a. Wakil presiden di awal kemerdekaan sampai dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat.	313
	b. Wakil presiden di tahun 1949 sampai dengan diberlakukan kembalinya UUD 1945.	316
	c. Wakil presiden di era orde lama sampai dengan diangkatnya pejabat mandataris MPR.	318

	d. Wakil presiden di era orde baru.	320
	e. Wakil presiden di era reformasi sampai dengan pelaksanaan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden.	327
	f. Wakil presiden hasil pemilihan langsung.	331
3.	Desain Konstitusional Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia ke Depan	351
BAB V	PENUTUP	360
1.	Kesimpulan	360
2.	Saran	361
	DAFTAR PUSTAKA	364
	INDEKS ISTILAH	389
	INDEKS SUBYEK	402
	GLOSARIUM	406